PENGADUAN MASYARAKAT BABEL KE OMBUDSMAN MENINGKAT

Selasa, 24 Juli 2018 - Indra

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Komisioner Ombudsman RI Alvien Lie mengatakan laporan pelayanan publik di Babel terbilang kecil dibandingkan provinsi lain.

Jenis aduan ini berkaitan ini penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, dan mempersulit pelayanan.

Ia menyebutkan sepanjang tahun 2017 laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik sebanyak 140 laporan.

Dengan substansi laporan terkait aspek kepegawaian, pertanahan, kesehatan, dan pendidikan.

"Pengaduan Ombudsman ke RI Tahun 2017 ternyara 140 laporan, instansi yang paling banyak ialahpemerintah kabupaten/kota 50 pengaduan, atua sekolah negeri sebanyak 16 laporan, BUMN/BUMD 15 laporan," kata Alvien saat menghadiri kunjungan kerja spesifik ke Babel, di ruang rapat Pasir Padi, Senin (23/7/2018).

Sedangkan untuk tahun 2018, dari Januari-Maret melalui Ombudsman Perwakilan Babel telah diterima 47 laporan. Hal ini meningkat dibandingkan tahun lalu.

"Laporan ada peningkatan hal ini dengan meningkatnya kesadaran masyarakat. Jumlah laporan yang mausk instansi kabupaten/kota 22 kasus, BUMN/BUMD 17 kasus, dan Pemprov 5 kasus. Substansi laporan dari 47 tahun 2018 terdisi aspek kesehatan 9 kasus, kepolisian 6 kasus, perizinan 5 kasus," katanya.

Menurutnya, dibandingkan provinsi lain tingkat aduan di Babel terbilang rendah. Babel juga memiliki prestasi yang cukup bagus.

"Dibandingkan provinsi lain prestasi Babel cukup bagus, Pemprov Babel tahun lalu masuk kategori hijau untuk kepatuhan, untuk kabupaten juga cukup Bagus bangka tengah, bangka, dan beltim masuk katagori hijau untuk kepatuhan," katanya.

Sedangkan untuk indeks maladministrasi tahun 2017 Babel terendah kedua setelah Bali.

"Komptensi PTSP kota Pangkalpinang tertinggi kedua setelah makasar, Secara umum cukup bagus. Jumlah laporan itu tergolong kecil dibandingkan jumlah populasi penduduk," katanya.